



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **15** /PBJ/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

Kabag Hukum	Kabag PBJ	Asisten
		

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

Kabag Hukum	Kabag PBJ	Asisten
		

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang

Kabag Hukum	Kabag PBJ	Asisten
		

dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2023 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;

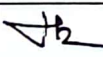
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.

Kabag Hukum	Kabag PBJ	Asisten
		

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, yang susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan entri data rencana umum pengadaan termasuk perubahannya; dan
 - b. Entri data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, petugas admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

Kabag Hukum	Kabag PBJ	Asisten
		

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal *2 Januari 2024*



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **15** /PBJ/2024

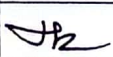
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA
UMUM PENGADAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA-NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		JUMLAH PETUGAS ADMIN
1	2		3
1.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU		
	A.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
	B.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
	C.	BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
	D.	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
	E.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
	F.	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
	G.	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
	H.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS

Kabag Hukum	Kabag PBJ	Asisten
		

1	2	3
	J. BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
2.	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
3.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
4.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
5.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
6.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
7.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
9.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
10.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
11.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
12.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
13.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KAWASAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
14.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
16.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
17.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
18.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
19.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS

Kabag Hukum	Kabag PBI	Asisten
		

1	2	3
20.	DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
21.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
22.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
23.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
24.	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
25.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
26.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
27.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	1 ORANG PETUGAS
28.	KECAMATAN PURING KENCANA	1 ORANG PETUGAS
29.	KECAMATAN EMPANANG	1 ORANG PETUGAS
30.	KECAMATAN BADAU	1 ORANG PETUGAS
31.	KECAMATAN BATANG LUPAR	1 ORANG PETUGAS
32.	KECAMATAN EMBALOH HULU	1 ORANG PETUGAS
33.	KECAMATAN SILAT HULU	1 ORANG PETUGAS
34.	KECAMATAN SILAT HILIR	1 ORANG PETUGAS
35.	KECAMATAN SEMITAU	1 ORANG PETUGAS
36.	KECAMATAN SEBERUANG	1 ORANG PETUGAS
37.	KECAMATAN SUHAID	1 ORANG PETUGAS
38.	KECAMATAN SELIMBAU	1 ORANG PETUGAS
39.	KECAMATAN JONGKONG	1 ORANG PETUGAS

Kabag Hukum	Kabag PBJ	Asisten
		

1	2	3
40.	KECAMATAN HULU GURUNG	1 ORANG PETUGAS
41.	KECAMATAN PENGKADAN	1 ORANG PETUGAS
42.	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	1 ORANG PETUGAS
43.	KECAMATAN BUNUT HILIR	1 ORANG PETUGAS
44.	KECAMATAN BUNUT HULU	1 ORANG PETUGAS
45.	KECAMATAN MENTEBAH	1 ORANG PETUGAS
46.	KECAMATAN EMBALOH HILIR	1 ORANG PETUGAS
47.	KECAMATAN KALIS	1 ORANG PETUGAS
48.	KECAMATAN BIKI	1 ORANG PETUGAS
49.	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	1 ORANG PETUGAS
50.	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	1 ORANG PETUGAS


 BUPATI KAPUAS HULU, 
 FRANSISKUS DIAAN